

EVALUASI DANA KELUARGA HARAPAN: PENGALOKASIAN, EFISIENSI, DAN DAMPAK PROGRAM

Muh. Fahrurrozi¹

Universitas Hamzanwadi¹
fahrurrozi@hamzanwadi.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan fokus pada pengalokasian dana, efisiensi penggunaan, dan dampak program. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait penelitian ini menggunakan metode kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian dana PKH cenderung efisien dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi dana dan kelangkaan sumber daya lokal. Efisiensi program ini juga dilihat dari dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi keluarga. Simpulan penelitian ini memberikan landasan bagi perbaikan pengalokasian dana, peningkatan transparansi, dan penyempurnaan mekanisme evaluasi untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Evaluasi, Penyaluran Dana, Program Keluarga Harapan

ABSTRACT

This research aims to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) with a focus on fund allocation, efficiency of use, and program impact. The research method used is a case study, collecting data through interviews, observation and analysis of documents related to this research using a combination of quantitative and qualitative analysis methods. The research results show that the allocation of PKH funds tends to be efficient in meeting the basic needs of beneficiary families. Despite this, several challenges are still faced, such as inequality in the distribution of funds and scarcity of local resources. The efficiency of this program can also be seen from its long-term impact on improving education, health and family economic independence. The conclusions of this research provide a basis for improving fund allocation, increasing transparency, and improving evaluation mechanisms to support sustainable development goals

Keywords: Effectiveness, Evaluation, Family Hope Program, Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Menjadi sebuah negara maju merupakan predikat yang diinginkan oleh setiap negara. Tidak hanya sebutan saja, namun menjadi negara maju harus mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sekaligus bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya (Abigael, 2020; Banjarnahor, 2020; Hidayah, 2022). Terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Permasalahan yang sering timbul di Negara berkembang yakni pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, ekonomi yang masih sangat kurang tertata, pendidikan yang tidak merata, dan kualitas penduduknya yang masih di bawah rata-rata (Gani, 2018; Harun, 2020; Linawati, 2021).

Dalam usaha meningkatkan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan, masyarakat juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan nama pemerintah (Linawati, 2021; Mandira, 2022; Priyatna, 2020). Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah menyediakan pelayanan-pelayanan sosial untuk masyarakat sebagai fasilitas untuk membantu mencapai sebuah kesejahteraan melalui upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Program Keluarga Harapan (Chasanah, 2021; Kasiwi, 2021; Nuraida, 2020; Suryana, 2019).

Sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas dan layanan dalam upaya menciptakan kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah dalam hal ini memberikan berbagai macam bantuan yang di berikan kepada masyarakat

miskin atau masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Beberapa program bantuan tersebut antara lain Program Indonesia Pintar, Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos rastra/bantuan pangan non-tunai (Alfiah, 2021; Aslinda, 2022; Nurkhalim, 2022; Umi, 2019).

Salah satu program tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini merupakan program yang memberikan bantuan secara bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (Kemensos, 2018). Persyaratan tersebut terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu mengenai kesehatan dan pendidikan, dengan harapan melalui program ini pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Kemensos, 2021).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH (Dehani, 2018; Fahrurrozi, 2023; Fahrurrozi, 2019; Pertiwi, 2019).

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-

negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Hughes, 2019; Millán, 2019; Novella, 2021). Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama Ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang distabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (Kemensos, 2018; Kemensos, 2021)

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara khusus, tujuan PKH itu sendiri adalah: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH itu sendiri, Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, Meningkatkan status kesehatan dan gizi Ibu hamil, Ibu nifas, anak bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) (Erfain, 2021; Magfira, 2022; Nandini, 2022; Suleman, 2017).

Dari beberapa tujuan PKH di atas yang menarik untuk di bahas adalah poin nomor dua, yakni meningkatkan taraf pendidikan, sementara berdasarkan data Dikbud dalam NTB satu data, angka putus sekolah jenjang SD sebanyak 344 orang atau 0,07 persen dan Lombok timur sebagai penyumbang terbanyak dengan total 97 siswa, jenjang pendidikan berikutnya yang banyak siswa putus sekolah adalah

SMK dengan jumlah mencapai 0,34 persen (Asmarini, 2022; Fahrurrozi, 2022; Jannah, 2022).

Yang menjadi persoalan adalah apakah layanan sosial tersebut mampu berjalan sesuai dengan konsep, tujuan dan keinginan untuk meningkatkan taraf pendidikan anak peserta PKH itu sendiri sehingga angka putus sekolah bisa menurun. Untuk itu, peneliti merasa perlu menyinggung persoalan ini secara rinci, karena melihat dari beberapa evaluasi program-program sebelumnya. Hal inilah yang menarik peneliti untuk meneliti tentang optimalisasi program keluarga harapan dalam meningkatkan perekonomian dan pendidikan, dengan tujuan untuk menganalisis tujuan PKH, penyaluran dana PKH, dan Menganalisis evaluasi PKH di Desa Labuhan Haji. Dalam penelitian ini, peneliti membahas hasil evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji Lombok Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PKH di daerah tersebut.

Merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa, apa yang direncanakan pemerintah dalam suatu program tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh (Sitepu, 2019) tentang evaluasi program keluarga harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum optimal meskipun pihak desa yang terkait dalam program sudah memberikan semua upaya yang terbaik untuk masyarakatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Idola, 2019) yang membahas tentang analisis pelaksanaan *family development session* bidang sanitasi PKH di Kecamatan Lengayang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan jika pelaksanaan FDS sanitasi belum berjalan optimal. Oleh sebab itu perlu peningkatan komitmen dari pendampingan untuk benar-benar melaksanakan FDS sesuai petunjuk, dan melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten agar bisa mengeluarkan kebijakan khusus FDS bidang sanitasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sofianto, 2020) yang membahas tentang implementasi program keluarga harapan di Provinsi Jawa Tengah. Simpulan dari penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan PKH di Jawa Tengah dari segi prosedur dan aspek manajerial dinilai sudah baik, namun sasaran program belum tepat karena adanya data yang tidak valid, yaitu sebesar 21,54% penerima PKH tidak miskin, dan hanya 13,99% penerima PKH yang miskin dan 26,21% sangat miskin. Masyarakat merasakan manfaat PKH untuk meringankan beban hidup mereka dan kalau bisa ditambah jumlahnya, di sisi lain masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sehingga menimbulkan konflik dan kecurigaan.

Penelitian ini mencakup area yang sangat penting dalam konteks pembangunan negara, terutama dalam upaya meningkatkan taraf pendidikan dan perekonomian masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Beberapa kebaharuan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya pertama, Melibatkan perbandingan dengan negara maju atau negara berkembang lainnya yang telah berhasil mengimplementasikan program serupa. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang

keberhasilan atau tantangan yang dihadapi oleh PKH, kedua Menganalisis sejauh mana PKH telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya, khususnya dalam meningkatkan taraf pendidikan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang keefektifan program dalam mencapai sasaran-sasaran spesifiknya. Ketiga, Memasukkan analisis dampak jangka panjang dari PKH terhadap pendidikan dan perekonomian masyarakat. Meneliti apakah program ini memiliki efek samping atau implikasi yang tidak diinginkan dalam jangka Panjang. Keempat, Memperdalam bagaimana partisipasi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat PKH, dapat mempengaruhi keberhasilan program. Apakah ada hambatan atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengikuti program ini?. Kelima, Melibatkan analisis lebih lanjut tentang dampak PKH terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Apakah program ini secara efektif mendukung kelompok-kelompok ini?. Kelima, Menyelidiki potensi pemanfaatan teknologi dalam optimalisasi pelaksanaan PKH. Misalnya, penggunaan aplikasi atau solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Lombok Timur.

Data primer diperoleh dari responden yang di antaranya: Koordinator PKH, Pendamping PKH, Kepala Desa, Kader dan peserta. Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel jurnal maupun dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data dari wawancara tentang kisi-kisi pertanyaan masalah yang akan diteliti. Melalui observasi pengamatan langsung pada kegiatan. Dan mendokumentasikan semua data dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

Instrumen yang digunakan adalah *Interview* atau disebut *interview guide* berbentuk dialog untuk memperoleh informasi dari responden. Pada saat pelaksanaan, *interview* dilakukan secara terstruktur maupun bebas, Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan bahan referensi.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, seperti fakta-fakta yang khusus dan konkrit selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis. Selama pengumpulan data berlangsung, sekaligus mereduksi data dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Setelah data dipilah dan dipilih kemudian disajikan dan dilakukan penarikan simpulan.

HASIL PENELITIAN

Tujuan Program Keluarga Harapan

Untuk mengetahui lebih jelas, terkait tujuan PKH itu sendiri berikut wawancara peneliti bersama narasumber atas selaku koordinator PKH Lombok Timur sekaligus sebagai pendamping PKH di Desa Labuhan Haji: *“Jadi sebenarnya tujuan dari PKH itu sendiri, selain mengentaskan kemiskinan dalam hal ini peningkatan pendapatan keluarga, juga agar masyarakat penerima bantuan ini mampu dan harus mengakses pelayanan sosial dan pendidikan bagi anak-anaknya”*

Pertanyaan serupa juga peneliti berikan kepada salah satu penerima PKH yang ada di Desa Labuhan Haji yaitu Ibu berinisial (S): *“Tujuan pemerintah*

memberikan bantuan ini kan agar anak-anak saya bisa bersekolah dengan baik dan tercukupi perlengkapan sekolahnya karena saya dan suami kan hanya seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sementara pengeluaran semakin hari semakin banyak, dari bantuan ini saja hanya cukup untuk anak-anak saja yang bersekolah, makanya sulit sekali rasanya saya dan keluarga bisa lepas dari dana PKH ini nak”

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa, tujuan dari PKH itu sendiri agar masyarakat penerima bantuan tersebut mampu dan harus mentaati aturan yang telah di buat, agar apa yang menjadi tujuan program ini bisa berjalan sebagai mana mestinya. Tujuan PKH itu bagi penerimanya sudah dicerna dengan baik, tapi setelah peneliti bertanya kembali tentang layanan pendidikan kepada narasumber yang sama, yaitu Ibu yang berinisial (S) dia menjawab: *“Anak saya yang menjadi persyaratan saya mendapatkan bantuan ini masih bersekolah, saya membelikan peralatan sekolahnya seperti buku, pakaian sekolah dan lain-lain itu kadang 1 tahun sekali tapi kalau masih kelihatan bagus 2 tahun sekali dan kadang dana PKH saya gunakan untuk keperluan lain”*

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tujuan secara aturan sudah diketahui namun di dalam penerapannya masih kurang baik karena menggunakan dana PKH untuk keperluan lain. Sama halnya yang disampaikan oleh salah satu penerima PKH yang berinisial Ibu (M) sebagai berikut: *“Anak saya masih bersekolah tapi dia jarang masuk sekolah karena malas, kalo di paksa malah ngelawan jadi saya jarang membelikannya keperluan sekolah jadi saya gunakan bantuan PKH tersebut untuk keperluan*

lain, seperti membeli pupuk karena saya kan petani nak”

Ibu berinisial (H) juga menjawab serupa dengan apa yang disampaikan oleh Ibu berinisial (M) di atas: *“Semua sekolah anak saya sekolah nak, kalo masalah dananya kadang saya gunakan untuk keperluan sehari-hari karena kan anak saya jarang minta dibelikan peralatan sekolah, karena kadang anak saya malas ke sekolah”*

Selain menyalahgunakan dana PKH sebagaimana mestinya juga terdapat aturan dari PKH itu sendiri yang dilanggar yaitu masalah komitmen awal yang mengatakan *“bagi anak sekolah harus rajin bersekolah”*.

Selain akses pendidikan, peneliti juga bertanya masalah akses kesehatan untuk penerima PKH kategori anak 0-6 tahun kepada Ibu inisial (N): *“Saya rajin ke posyandu membawa anak saya setiap bulannya, karena peserta PKH katanya diwajibkan mengikuti posyandu, kalau tidak, akan dikenakan pemotongan jumlah uang pada saat pencairan, tapi walaupun saya tidak dapat bantuan juga kalau masalah kesehatan saya bakalan tetap bawa anak saya posyandu”*

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu inisial (Y) dalam kategori lansia: *“Saya mau dan senang posyandu lansia tapi kan di desa ini tidak ada posyandu lansia, cuman pernah sekali saja itu pun udah lama sekali dan tidak pernah di adakan kembali”*.

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa untuk akses kesehatan peserta penerima PKH kategori anak 0-6 tahun dan lansia sangat antusias mengikuti apa yang menjadi aturan.

Penyaluran Program Keluarga Harapan

Penyaluran dana PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap yakni bulan Januari, April, Juli dan Oktober melalui bank BRI, Mandiri dan BNI. Untuk kecamatan Sakra Timur khususnya di Desa Labuhan Haji sendiri, penyaluran dana PKH hanya dilakukan melalui bank BRI yang dalam hal ini BRI *link*.

Untuk mengetahui lebih jelas terkait proses pencairan dana bantuan maka peneliti melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan. Seperti yang dijelaskan oleh koordinator PKH Lombok Timur: *“Jadi dek pencairan dana PKH ini kami lakukan 3 bulan sekali, jadi kalo pertahun itu 4 kali pencairan, dan semenjak corona ada bantuan berbentuk sembako juga untuk para penerima bantuan PKH, dan pencairannya di lakukan di BRI link terdekat yang sudah bekerja sama dengan dinsos”*.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu peserta PKH Ibu yang berinisial (AM): *“Pencairannya 3 bulan sekali nak, pencairannya kita bisa cairkan sendiri tanpa perantara, kalo dulu kan ribet, kita harus ke pos dan harus didampingi oleh pendamping PKH”*

Ibu berinisial (R) juga memberikan pernyataan yang sama tentang penyaluran dana PKH: *“Kita ambil uang PKH itu 3 bulan sekali dik, dan kita ambil uangnya di BRI link terdekat”*.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana PKH di Desa Labuhan Haji itu sendiri dilakukan sekali dalam 3 bulan melalui Bank BRI yang dalam hal ini BRI *link*.

Adapun informasi yang didapat oleh masyarakat disampaikan oleh pendamping PKH melalui ketua kelompok peserta. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu berinisial (N) : *“Jadi dek kalo pencairan itu kita nunggu informasi dari ketua kelompok saja, tapi kadang ada saja kita denger dan lihat dari desa sebelah yang sudah ribut-ribut tentang pencairan jadi tanpa diinformasikan oleh ketua kelompok juga kadang inisiatif sendiri ngecek, apakah dananya sudah cair atau tidak”*.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu berinisial (N): *“Kalo gak ada informasi dari ketua kelompok kadang walaupun sudah cair kita belum mengambilnya karena takut nanti malu kalau kosong di depen kasir BRI linknya, tapi yang Namanya uang kadang belum diinfokan ketua kelompok semua pada heboh liat pencairan dana desa sebelah”*.

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa masyarakat penerima PKH sudah mulai mandiri dalam penarikan dana yang diterima.

Mekanisme Pelaksanaan PKH di Desa Labuhan Haji **Pemilihan Daerah dan Pemilihan Peserta PKH**

Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional. atau proses pertama dalam program keluarga harapan yaitu salah satunya adalah seleksi dan penetapan lokasi. Adapun wawancara peneliti bersama koordinator PKH Lombok Timur bapak Samsul Hadi: *“Pemilihan daerah dan peserta itu murni dari pihak kementerian sosial yang bekerja sama dengan pemda, kecamatan, desa. Jadi saya hanya menerima nama-nama yang di rekomendasi yang kemudian saya*

bersama team lapangan melakukan survei layak atau tidaknya calon peserta PKH tersebut mendapatkan bantuan”.

Serupa yang disampaikan oleh kepala Desa Labuhan Haji: *“Desa hanya di minta dari dinas sosial untuk merekomendasikan nama-nama yang pantas mendapatkan bantuan, masalah siapa yang lolos sebagai peserta itu, itu murni urusan dinas sosial”*.

Hal serupa juga disampaikan oleh koordinator PKH: *“Jadi keterlibatan desa dalam bantuan ini sebatas rekomendasi nama-nama calon yang akan mendapatkan bantuan PKH”*.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, dalam melakukan seleksi peserta PKH itu sendiri data-datanya diambil melalui desa/kelurahan, yang kemudian desa memilih masyarakat yang kurang mampu atau RTM untuk diajukan sebagai calon peserta penerima bantuan PKH itu sendiri. Sehingga dari sinilah akan diseleksi oleh team lapangan dinas sosial.

Pertemuan Awal dan Validasi Peserta PKH

Setelah proses penetapan lokasi dan seleksi calon penerima selanjutnya yaitu pertemuan awal peserta calon penerima dengan pendamping PKH. Pertemuan ini dilakukan pendamping dengan Kepala Desa dan para calon penerima bantuan. Pertemuan ini dinamakan sosialisasi pra-calon penerima bantuan PKH yang dimaksudkan bahwa peserta yang hadir disini belum tentu semuanya terpilih dalam bantuan PKH tapi disini masih ada seleksi berkas.

Dalam pertemuan ini harus dihadiri oleh wanita dewasa yang sedang mengurus rumah tangga. Karena nama yang akan tercantum sebagai penerima bantuan PKH ini adalah wanita yang

sedang mengurus rumah tangga, bukan kepala keluarga. Namun terdapat pengecualian jika dalam pertemuan tersebut pihak perempuan berhalangan untuk menghadiri pertemuan pra calon penerima maka bisa digantikan dengan kepala rumah tangga atau yang bisa mewakili.

Seperti yang diungkapkan pendamping PKH Desa Labuhan Haji pada saat wawancara sebagai berikut: *“Sebelum saya turun lapangan kan saya sudah dapat nama-nama para calon dari BPS jadi setelah mendapatkan data itu saya langsung turun lapangan dimana saya berkoordinasi dengan pihak desa untuk mengumpulkan warganya yang menjadi calon penerima bantuan. Untuk menentukan calon peserta itu, dilakukan sosialisasi pra calon peserta untuk validasi mencocokkan data-data calon keluarga penerima PKH dimana dilakukan pengecekan apakah peserta ini layak untuk menerima bantuan dan sesuai dengan komponen dari PKH”*.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa sebelum pendamping turun ke lapangan untuk pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH mereka sudah memegang nama-nama pra-calon penerima bantuan yang lolos dari pangkalan data untuk seleksi berkas dan kesesuaian komponen PKH.

Verifikasi atas Pemenuhan Syarat

Proses verifikasi itu dilakukan oleh pendamping dengan sistem wawancara mengenai keadaan dan kondisi para peserta mengenai kelayakan di dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menerima dana bantuan PKH.

Syarat-syarat komponen yang harus dipenuhi antara lain peserta memiliki anak yang masih melanjutkan pendidikan SD, SMP, SMA, anak yang masih balita, Ibu hamil, distabilitas berat dan lanjut usia. Verifikasi di Desa

Labuhan Haji dilakukan sebelum pencairan, proses pelaksanaan verifikasi data yang dilakukan pendamping ini untuk mengecek perubahan data dari PKH apakah mereka layak atau tidak menerima dana bantuan dari PKH.

Verifikasi dilakukan secara rutin oleh pemberi layanan kesehatan dan pendidikan. Untuk komponen kesehatan, verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH dengan melakukan kunjungan ke puskesmas/pustu terdekat. Kegiatan ini rutin dilakukan sesuai jadwal posyandu masing-masing kelurahan/desa, Ibu hamil harus memeriksakan kandungannya setiap bulan saat posyandu dilakukan, Ibu nifas setiap bulan setelah melahirkan, bayi 0-6 tahun harus selalu mengikuti posyandu dan pemberian vitamin. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan mencatat peserta PKH yang melakukan layanan kesehatan.

Untuk komponen pendidikan yang bertanggung jawab dalam verifikasi adalah guru. Guru mencatat peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85% hadir sekolah atau ketentuan tatap muka setiap bulannya dan pengecualian saat sakit dan terkena bencana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pendamping PKH sebagai berikut: *“Jadi untuk verifikasi data dan pemenuhan syarat peserta itu harus memenuhi setiap persyaratan komponen dimana setiap peserta dalam komponen kesehatan maka wajib melakukan posyandu pemeriksaan kesehatan setiap bulan dan dalam komponen pendidikan maka seluruh anak dari anggota keluarga yang menjadi peserta PKH harus rajin- rajin ke sekolah karena jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka dikenakan sanksi”*.

Verifikasi data dan pemenuhan syarat peserta PKH harus selalu memenuhi setiap komitmen yang telah ditetapkan.

Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data yaitu apabila ada perubahan data dari RTSM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada master data base yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendamping yang dilaksanakan oleh pihak PKH. Pemutakhiran data biasanya dari laporan peserta PKH dan pendamping bekerja sama dengan ketua kelompok peserta PKH untuk memverifikasi perubahan data terkait menggunakan format pemutakhiran data.

Seperti yang dijelaskan pendamping PKH di Desa Labuhan Haji: *“Masalah pemutakhiran data itu dilakukan apa bila ada laporan masuk jika ada anggota Peserta PKH ada datanya yang berubah contohnya dia baru melahirkan atau dia hamil baru masuk anaknya SD, SMP, SMA atau yang lain, maka mereka wajib melapor ke ketua kelompok agar secepatnya dilakukan pemutakhiran data agar nantinya data-datanya tidak valid dan berimbas kepenerimaan bantuan nantinya”*.

Serupa yang disampaikan oleh salah satu penerima PKH yaitu Ibu berinisial (W): *“Data baru itu kalo masyarakat mengalami perubahan misalnya anak kita sudah tamat SMA kita harus lapor, tapi kalau tidak melapor kadang kelolosan jadinya dapet lagi kita uang PKH nya”*

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa pemutakhiran data dilakukan apabila ada laporan masuk ke pendamping sehingga jika tidak ada laporan pendamping tidak akan mengubah data-data peserta meskipun

peserta ada penambahan atau pengurangan komponen, maka dari itu jika ada masalah respon dari peserta langsung kepada ketua kelompok sehingga data di pusat selalu valid.

Pencairan Dana Awal

Pencairan dana PKH atau bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH yang telah lolos seleksi mengikuti setiap syarat program memenuhi komponen PKH melakukan .validasi .dan pemutakhiran data.

Dengan itu untuk membuktikan kepesertaannya adalah memiliki kartu PKH yang tercantum nama Ibu/wanita yang mengurus anak, kartu PKH itu diberikan langsung oleh pendamping PKH setelah peserta dinyatakan lolos sebagai peserta PKH.

Dari awal peluncuran program PKH yaitu dari 2007-2015 proses pencairan dilakukan 3 tahap atau 3 kali setahun dan dilakukan di pos. Namun dari tahun 2016-2020 Proses pencairan dana PKH melalui 4 kali tahap selama 1 tahun dan pencairan dilakukan 3 bulan sekali melalui bank.

Seperti yang dijelaskan oleh pendamping PKH bahwa mengenai pencairan tahap pertama bagi peserta baru saat wawancara sebagai berikut: *“Pencairan dana PKH bagi peserta yang baru sama saja dengan yang lama mereka mendapatkan kartu peserta PKH mereka ke bank atau sekarang sudah tersedia di BRI link terdekat yang bekerjasama dengan dinas sosial.”*.

Hal serupa juga di sampaikan oleh peserta PKH yaitu Ibu berinisial (S): *“Sama saja pencairannya dek, mau baru atau lama intinya kita itu harus punya kartu PKH atau ada sejenis rekening tabungan dan kartu ATM”*.

Dari hasil wawancara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima bantuan yang baru maupun yang lama sama saja, semua pencairan baru bisa

dilakukan apa bila peserta memiliki kartu PKH dan pencairan dilakukan di Bank yang telah ditetapkan dan dilakukan masing-masing tanpa pendamping.

Evaluasi Program Keluarga Harapan Responsivitas

Responsivitas program keluarga harapan merupakan bentuk respon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang timbul akibat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan bantuan PKH. Tanggapan itu biasa berupa respon positif maupun negatif, *Responsivitas* berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan. *Responsivitas* pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji mendapatkan berbagai respon dari yang positif hingga yang negatif.

Kepuasan diungkapkan oleh peserta saat dilakukan wawancara mengenai program keluarga harapan (PKH) antara lain seperti yang diungkapkan oleh Ibu berinisial (H) mengatakan: *"Alhamdulillah nak puas berkat bantuan ini biaya untuk membeli alat sekolah anak saya tercukupi"*.

Dari wawancara di atas dengan salah satu penerima bantuan atau KPM mereka sangat puas atas bantuan ini, mereka sangat terbantu dalam hal finansial dan bantuan sekolah anak-anaknya. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Ibu (W): *"Saya puas dek berkat bantuan ini bisa semua sekolah anak-anakku dan juga ada biaya-biaya bantuan di terima disekolah karena masuk sebagai peserta PKH, bersyukur sekali jadi penerima bantuan PKH"*.

Dari hasil wawancara dengan Ibu (W) juga merasa terbantu karena berkat bantuan ini anak-anaknya juga mendapat bantuan disekolah sehingga

meringankan beban biaya sekolah anaknya.

Beda halnya yang disampaikan oleh salah satu peserta PKH, justru menyampaikan hal yang berbeda yaitu Ibu berinisial (N): *"Alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan ini nak, tapi dananya hanya mampu buat beli peralatan anak sekolah tidak untuk keperluan sehari-hari, makanya saya sekali setahun kadang 2 kali setahun belikan anak saya perlengkapan sekolah, karena di pakai untuk keperluan yang lain dulu uangnya, di marahin sama pendamping tapi apa boleh buat, kan kepepet nak"*.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu berinisial (Z): *"Kalo masalah bersyukur, saya bersyukur dik dapat bantuan ini tapi jumlahnya kurang banyak, karena hanya mampu untuk anak-anak sekolah aja, makanya kadang uangnya saya pakek untuk yang lain juga"*.

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak penerima PKH yang tidak menggunakan dana PKH itu sendiri sesuai dari apa yang diharapkan pemberi bantuan, yang dalam hal ini Dinas Sosial.

Bukan karena mereka tidak tahu fungsi dana tersebut tetapi karena kurang mempunyai penerima bantuan di dalam mengatur dana yang diterima. Sejak awal menerima bantuan sosial PKH, para peserta PKH mengaku senang meskipun bantuan diberikan bukanlah bantuan penuh, mereka sudah bersyukur karena dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban pengeluaran keluarga, mereka juga berharap bahwa bantuan ini berjalan terus, mereka juga berharap menjadi KPM mereka berharap tidak dikeluarkan sebagai peserta PKH. Pihak desa juga berharap bahwa bantuan ini ke depannya pelaksanaan harus lebih diperbaiki terutama masalah data.

Seperti yang disampaikan oleh kepala Desa Labuhan Haji: *“Semoga saja PKH ini mampu mengurangi angka kemiskinan di desa kami, harapan kami semoga ada penambahan peserta yang dapat dan yang sudah sepantasnya lepas dari PKH supaya dilepas saja agar tidak ada lagi kecemburuan sosial”*.

Adapun berdasarkan observasi penelitian di lapangan ditemukan bahwa *Responsivitas* dari program ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat karena bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan berupa uang tunai dan sembako sangat membantu kehidupan masyarakat biaya pendidikan dan kesehatan juga.

Tepat Sasaran

Ketepatan program keluarga harapan ini mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta program keluarga harapan di lapangan. Ketepatan erat kaitannya dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan satu kriteria individu tetapi lebih dari dua kriteria secara bersama-sama.

Maka dari itu untuk mengetahui tingkat ketepatan dari program ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Informan yang pertama yaitu koordinator PKH Lombok Timur: *“Kalau bicara tentang ketepatan dek saya rasa sudah tepat karena masyarakat yang menerima bantuan PKH itu sudah melalui beberapa tahap dalam pemilihan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ada komponen yang menjadi acuan pemerintah dalam memilih penerima bantuan PKH”*.

Dari hasil wawancara dengan koordinator PKH Lombok Timur, bahwa dalam hal ketepatan penerima bantuan sudah tepat dan sesuai dengan sasaran

yang inginkan dan penentuan juga melalui tahap seleksi. Sama halnya dengan yang diungkapkan Kepala Desa Labuhan Haji: *“Ya masalah ketepatan saya rasa sudah tepat pada sasaran semua warga saya yang masuk PKH ini memang layak, mereka yang masuk golongan prasejahtera. Memang mungkin ada beberapa yang sudah layak untuk dikeluarkan dan diganti oleh yang layak namun itu semua saya kembalikan lagi ke pihak PKH dimana mereka menilai sendiri”*.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa ketepatan bantuan memang sudah tepat dilihat dari mereka yang menerima.

Kecukupan

Kecukupan Program Keluarga Harapan berkaitan dengan sejauh mana kepuasan para peserta keluarga harapan PKH sebagai sasaran program di dalam mencukupi kebutuhan, dengan adanya PKH maka ada beberapa hal yang secara tidak langsung akan terbantu misalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan dan mengurangi beban orang-orang yang tidak mampu. Kecukupan berkenaan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan dan nilai, konsep awal dari pelaksanaan PKH. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala Desa Labuhan Haji: *“Bicara memecahkan kemiskinan dengan bantuan PKH ini dek, kayanya tidak. Dalam artian bahwa bantuan ini tidak bisa memecahkan kemiskinan namun jika dikatakan meringankan beban masyarakat itu lebih bagus kedengarannya, karena dengan adanya bantuan ini warga saya dapat terbantu khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan”*.

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh koordinator PKH Lombok Timur: *“Bicara tentang kecukupan bantuan PKH ini saya selaku*

yang mengkoordinir PKH di Lombok Timur khususnya di Desa Labuhan Haji hanya berpesan agar masyarakat memanfaatkan bantuan ini semestinya dan seperlunya agar bermanfaat dan berkecukupan untuk keluarganya. dan jika dikatakan apakah bantuan ini bisa memecahkan kemiskinan saya rasa tidak, hanya saja membantu kebutuhan masyarakat yang kurang mampu”.

Dapat disimpulkan bahwa untuk memecahkan kemiskinan itu satu hal yang besar untuk dilakukan namun jika dikatakan bahwa bantuan ini mampu meringankan beban masyarakat itu bisa saja. Sehingga program ini harus dimanfaatkan oleh peserta sebaik-baiknya dan digunakan semestinya.

Untuk mengetahui tingkat kecukupan bantuan program keluarga harapan ini di Desa Labuhan Haji. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peserta PKH sebagai berikut: Informan pertama yaitu Ibu berinisial (ZT) selaku peserta PKH: *“Kalau bantuan ini dibidang cukup tidak untuk kehidupan sehari-hari ya dicukupkan saja, karena kan pencairannya 3 bulan sekali dan itu pun jumlahnya tidak menentu, kadang banyak kadang sedikit kita dapat”*.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan dalam indikator kecukupan ini hanya bisa digunakan dalam jangka pendek. Karena bantuan ini juga memiliki komponen sehingga banyak komponen terpengaruh dengan nominal yang diterima. Informan kedua yaitu Ibu berinisial (S) selaku peserta PKH: *“Bantuan PKH dicukupkan saja, itu yang masuk ke rekening ya itu yang kita dapat, karena pemikiran saya, siapa lagi yang memberi kita uang 3 bulan sekali tanpa bekerja”*.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kecukupan dia menganggap bahwa bantuan ini harus dicukupkan saja

dengan kebutuhan karena mereka bersyukur sudah bisa mendapatkan bantuan ini dalam hal cukupnya memang belum bisa dikatakan cukup untuk kehidupan sehari-hari peserta.

Dari hasil observasi di lapangan disimpulkan bahwa dalam indikator kecukupan ini peneliti mendapatkan kenyataan bahwa bantuan yang didapat oleh masyarakat kadang habis sebelum waktunya atau juga digunakan dalam hal lainnya sehingga bantuan ini terlihat habis sesaat dan masyarakat tidak bisa menggunakan dalam jangka waktu yang lama dan belum bisa memecahkan kemiskinan.

Pemerataan

Pemerataan program keluarga harapan merupakan manfaat yang diterima oleh peserta PKH disalurkan secara merata, jadi dengan kata lain pemerataan berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat. Di Desa Labuhan Haji sendiri untuk pemerataan menurut penjelasan informan belum merata: *“Dari 2.450 KK hanya 500 an KK yang mendapatkan bantuan PKH di Desa ini, sementara masih banyak warga saya yang masih layak mendapatkan bantuan, harapan saya untuk orang-orang di dinas sosial untuk mendata kembali orang-orang atau keluarga yang pantas mendapatkan bantuan tersebut, agar tidak ada lagi terjadi kecemburuan sosial”*.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa warga Desa Labuhan Haji masih banyak yang layak menerima bantuan namun tidak menerima bantuan tersebut sehingga menimbulkan kecemburuan dan menyalahkan pihak desa.

Sama halnya yang disampaikan oleh salah satu peserta PKH Desa Labuhan Haji yaitu Ibu inisial (N): *“Tidak merata menurut saya nak, soalnya ada janda dekat rumah saya*

yang punya anak bersekolah dan dia hanya seorang buruh, yang penghasilannya tidak menentu yang seharusnya dapat tapi nyatanya tidak nak”.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa memperkuat pernyataan dari dua informan di atas bahwa memang bantuan PKH ini belum merata, masih banyak warga yang layak untuk bantuan ini.

Dari permasalahan tersebut, peneliti melakukan klarifikasi kepada koordinator PKH: *“Begini dek, masalah merata atau tidaknya mungkin semua daerah yang menerima bantuan dari PKH itu memang tidak merata, karna bantuan ini menjadi primadona di kalangan masyarakat, Semua masyarakat merasa berhak menerima bantuan ini apa lagi mereka yang memang kurang mampu keluarga yang tergolong dalam pra sejahtera. Namun meskipun masuk dalam keluarga pra sejahtera, namun tidak ada komponen yang bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan bantuan PKH ini dek itu alasannya kenapa PKH ini belum merata karena banyak pertimbangan dan banyak komponen yang harus diperhatikan dan diikuti”.*

PEMBAHASAN

Dari hasil penjelasan responden di atas, bahwa untuk Desa Labuhan Haji dalam hal pemerataan belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan PKH.

Proses tidak meratanya persebaran bantuan PKH sebenarnya disebabkan oleh konsep dasar dari PKH itu sendiri karena dalam bantu PKH harus menjangkau komponen-komponen yang menjadi kriteria penerima bantuan PKH, jika menjangkau rumah tangga sangat miskin masyarakat yang masih tergolong

miskin dalam sosial ekonomi belum bisa jadi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Mereka yang tergolong miskin masih bisa mendapatkan dana bantuan dari program pemerintah lainnya.

Dari hasil penelitian di lapangan juga didapatkan bahwa pemerataan bantuan program keluarga harapan ini memang belum sepenuhnya merata atau dengan kata lain masih banyak masyarakat yang layak untuk program ini. Selain itu didapatkan juga bahwa sudah banyak penerima yang sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan ini namun belum juga diganti dengan yang layak.

Namun, di sisi lain, masyarakat yang tergolong miskin namun belum memenuhi kriteria PKH masih memiliki akses terhadap dana bantuan dari program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kriteria penerima bantuan PKH agar lebih memperhitungkan variasi kondisi sosial ekonomi di Desa Labuhan Haji. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa pemerataan bantuan PKH belum sepenuhnya merata, dan masih banyak masyarakat yang sebenarnya layak untuk program ini namun belum mendapatkan bantuan. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada penerima bantuan PKH yang sudah tidak memenuhi syarat lagi namun belum digantikan oleh penerima yang memenuhi kriteria.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji. Evaluasi kembali kriteria penerima bantuan, peningkatan efisiensi dalam pendistribusian bantuan, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap penerima bantuan yang sudah tidak memenuhi syarat, dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemerataan dan

efektivitas program ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa bantuan PKH dapat lebih merata dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Labuhan Haji.

Selain itu, perlu dilibatkan juga partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses identifikasi penerima bantuan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan aparat desa, dapat lebih akurat menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan siapa yang sudah tidak memenuhi syarat lagi.

Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi hal yang krusial. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, dapat lebih cepat terdeteksi adanya perubahan kondisi ekonomi atau sosial masyarakat penerima bantuan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengkaji ulang kelayakan penerima bantuan dan menggantinya dengan yang lebih membutuhkan.

Tidak hanya itu, pendekatan pembangunan berbasis masyarakat juga dapat menjadi solusi. Dengan melibatkan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini juga dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi.

Penting untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi bantuan. Informasi mengenai kriteria penerima bantuan, jumlah bantuan yang diterima, dan proses seleksi harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi

implementasi program serta memberikan masukan yang konstruktif. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Labuhan Haji dapat lebih efektif, merata, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

SIMPULAN

Dalam rangka memberikan gambaran menyeluruh tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki mekanisme penyaluran dana yang terorganisir dengan baik. Penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan melalui bank BRI dan BRI *link*, dengan 4 tahap penyaluran setiap tahunnya pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Selain dana, penerima PKH juga mendapatkan bantuan sembako. Meskipun informasi penyaluran disampaikan melalui pendamping dan ketua kelompok, masyarakat penerima PKH semakin mandiri dalam penarikan dana. Beberapa peserta bahkan memeriksa sendiri status pencairan, menunjukkan tingkat partisipasi dan kemandirian yang positif.

Mekanisme pelaksanaan PKH melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemilihan peserta, pertemuan awal, validasi, dan verifikasi. Evaluasi program menunjukkan Responsivitas yang baik, dengan beberapa peserta merasa puas karena terbantu secara finansial dan pendidikan. Namun, masih ada keluhan terkait jumlah dana yang kurang memadai, dan beberapa peserta tidak menggunakan dana dengan benar.

Secara keseluruhan, PKH dinilai tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, terdapat harapan agar pelaksanaan program dapat diperbaiki,

terutama dalam hal pengaturan data dan peningkatan jumlah dana bantuan agar lebih memadai bagi peserta. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Labuhan Haji telah dilaksanakan dengan mekanisme yang melibatkan pemilihan daerah, pertemuan awal, verifikasi, pemutakhiran data, dan pencairan dana. Evaluasi program menunjukkan *Responsivitas* yang beragam dari peserta, tepat sasaran dalam seleksi, kecukupan yang dilihat dari sudut pandang tertentu, dan adanya perasaan ketidakmerataan di antara warga penerima bantuan. Saran dan harapan mencakup pemerataan yang lebih baik, pemilihan peserta yang lebih adil, dan pemanfaatan bantuan dengan bijak. Program ini diharapkan terus berlanjut dengan evaluasi yang baik untuk meningkatkan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigael, N. F., & Ernawaty, E. (2020). Literature Review: Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menerima Telehealth atau Telemedicine antara Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 302–310. <https://doi.org/10.26630/jk.v11i2.2000>
- Alfiah, N. (2021). Klasifikasi Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode Naive Bayes. (1). <https://doi.org/10.35842/jtir.v16i1.386>
- Aslinda, Guntur, M., & Suhartini. (2022). The implementation of multi-organization model on Program Keluarga Harapan in Makassar city. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43(1). <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.1.19>
- Asmarini, S. Dela, Sulaimiah, S., & Nururly, S. (2022). Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kinerja melalui Motivasi Kerja Pendamping PKH Lombok Timur. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.55382/jurnalpus takaaktiva.v2i1.134>
- Banjarnahor, D. N., Atikah, I., Utomo, S., Hastarini, A., Moridu, I., Kuahaty, S. S., Basri, A. D., Mulyani, S., Sulaiman, S., & Suyatno, A. (2020). Aspek Hukum Bisnis. Widina Bhakti Persada Bandung. Jawa Barat.
- Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5). <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.156>
- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.30997/jgs.v4i1.1140>
- Erfain, Harianto, Ek., Titop, H., Haeruddin, Jawiah, Haeriyah, Lebang, N., & Togala, R. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batutas Kabupaten Buton Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.40>

- Fahrurrozi, M., & Mohzana. (2019). The Development of Android-Based Economic Teaching Materials for Student Independence. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(6). https://www.ijicc.net/images/vol5iss6/5630_Fahrurrozi_2019_E_R.pdf
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Mispandi, M., & Murcahyanto, H. (2023). Developing Basic Accounting E-Module Based on Scientific Approach in Vocational High Schools. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), 356–364. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i1.7117>
- Fahrurrozi, M., Mohzana, M., Murcahyanto, H., & Basri, H. (2022). Trainers' Performance in Entrepreneurship Class: Evidence from Lesson Planning of Non-Formal School in Lombok Timur. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.2022>
- Gani, U. A., Salasi, R., Bambang, R. M., & Umam, K. (2018). Analisis Diskriminan untuk Mengelompokkan Negara Maju dan Negara Berkembang dengan Metode Fishers. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.52626/jg.v1i1.6>
- Harun, P. (2020). Perubahan Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi : Bukti Empiris Kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 5(3). <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i3.158>
- Hidayah, I., Yulhendri, Y., & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>
- Hughes, C. (2019). Reexamining the Influence of Conditional Cash Transfers on Migration From a Gendered Lens. *Demography*, 56(5). <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00815-0>
- Idola, D., Bachtiar, H., & Abdiana, A. (2019). Analisis Pelaksanaan Family Development Session Bidang Sanitasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lengayang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(3). <https://doi.org/10.25077/jka.v8i3.1040>
- Kasiwi, A. N., Nurmandi, A., Mutiarin, D., & Azka, M. F. (2021). Artificial Data Management in Reaching Conditional Cash Transfer of Program Keluarga Harapan (PKH) Utilizing Simple Addictive Weighting. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012013>
- Kemensos, D. P. (2018). Apa Itu Program Keluarga Harapan. Diakses dari <https://pkh.kemensos.go.id>.
- Kemensos, R. (2021). Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. BN. 2021 No. 578, Jdih.Kemensos.go.id. 4(1), 1–2.
- Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks

- Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547>
- Magfira, & Saharuddin, E. (2022). Evaluasi program keluarga harapan (PKH) di kabupaten Bantul. *The Journalish: Social and Government*, 3(3). <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.273>
- Mandira, I. M. C., & Jaya Kusuma, P. S. A. (2022). Strategi digitalisasi ekonomi kerakyatan. *Management and Accounting Expose*, 5(1). <https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.633>
- Millán, T. M., Barham, T., Macours, K., Maluccio, J. A., & Stampini, M. (2019). Long-term Impacts of Conditional Cash Transfers: Review of The Evidence. *In World Bank Research Observer* 34(1). <https://doi.org/10.1093/wbro/lky005>
- Nandini, R., Putri, B. G. R., Setiawan, S. N., Anggraeni, F., & Fedryansyah, M. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>
- Novella, R., Ripani, L., & Vazquez, C. (2021). Conditional cash transfers, female bargaining power and parental labour supply. *Journal of International Development*, 33(2). <https://doi.org/10.1002/jid.3530>
- Nur Aeda, & Riadul Jannah. (2022). Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98>
- Nuraida, N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Nurkhalim, R. F., Susilowati, I., & Jayanti, K. D. (2022). Program Keluarga Harapan: A Conditional Cash Transfer to Increase Prenatal Visits and Birth Weight. *Journal of Public Health in Africa*, 13(3). <https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271>
- Pertiwi, I. P., Fedinandus, F., & Limantara, A. D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *CAHAYAtech*, 8(2). <https://doi.org/10.47047/ct.v8i2.46>
- Priyatna, C. C., Prastowo, FX. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi Teknologi Informasi oleh Lembaga Pemerintah dalam Aktivitas Komunikasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.26115>
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1).

<https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.160>

- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 14–31. <http://dx.doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213>
- Suryana, A., Sugiana, D., & Trulline, P. (2019). Pengaruh Atribut Agen Perubahan (Agent of Change) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Perubahan Sikap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.10061>
- Umi kalsum, Nurul Umi Ati, H. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(6). <https://media.neliti.com/media/publications/80681-ID-implementasi-program-keluarga-harapan-pk.pdf>